

## Pemkab Bekasi Gelontorkan Rp4,7 Miliar untuk Tanggulanghi Bencana Banjir

**BEKASI (IM)** - Pemerintah Kabupaten Bekasi menggelontorkan Rp4,7 miliar untuk penanggulangan banjir yang melanda daerah itu sepanjang dua pekan terakhir melalui pendistribusian bantuan logistik serta perbaikan saluran air bermasalah.

"Besok (Senin ini-red) pencairan Rp2,8 miliar. Kemarin dicairkan Rp1,9 miliar. Anggaran ada di berbagai dinas tapi pencairan BPBD, mereka yang mengkoordinir," kata Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bekasi, Huda, Minggu (12/3).

Alokasi anggaran itu digunakan setelah Penjabat Bupati Bekasi, Dani Ramdan menetapkan status tanggap darurat bencana hidrometeorologi. Status ini dinaikkan dari sebelumnya siaga darurat setelah banjir meluas hingga hampir melanda seluruh kecamatan.

Pencairan anggaran ke-daruratan itu mulai dilakukan mulai pekan kemarin untuk berbagai keperluan terutama bantuan logistik warga terdampak. Anggaran juga dialokasikan untuk kebutuhan obat-obatan, di mana banyak warga mengeluhkan berbagai penyakit.

Tidak hanya itu, anggaran dialokasikan untuk perbaikan sejumlah saluran air. Hal ini dilakukan lantaran terdapat beberapa titik banjir yang diakibatkan oleh saluran air yang tersumbat. "Jadi dari berbagai dinas, seperti obat-obatan dari Dinas Kesehatan dan ada juga dari Dinas Sosial untuk permukiman. Kemudian dari Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, dan Bina Konstruksi untuk perbaikan saluran air," ucapnya.

Huda mengaku secara keseluruhan pemerintah daerah menyiapkan anggaran sebesar Rp11 miliar yang dialokasikan untuk kebutuhan kegawatdaruratan dalam kurun waktu setahun ke depan.

"Awalnya yang disiapkan itu sekitar Rp5 miliar namun ada pergeseran ang-

garan untuk mengantisipasi efek yang tidak diinginkan dari bencana. Maka kemudian ditambah menjadi Rp11 miliar dan sudah disalurkan sekitar Rp4,7 miliar,"katanya.

Kepala Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, dan Bina Konstruksi Kabupaten Bekasi, Henri Lincoln mengatakan telah menerjunkan tim untuk menangani berbagai persoalan pada saluran air salah satu penyebab genangan air di permukiman warga. Perbaikan dilakukan secara cepat demi mengatasi sekaligus mencegah banjir kembali terulang.

"Kami sudah melakukan perbaikan untuk penanganan ini. Fokus kami pada saluran-saluran air yang menyumbat," ucapnya.

Seperti diketahui, lebih dari dua pekan terakhir Kabupaten Bekasi dilanda banjir. Bahkan banjir pernah mencapai lebih dari 100 titik di hampir 20 kecamatan. Sedikitnya 60.000 warga terdampak terpaksa mengungsi lantaran banjir yang terus meninggi. Atas kondisi tersebut, status tanggap darurat pun diaktifkan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bekasi nomor HK.02.02/Kep-227-BPBD/2023 tentang Status Tanggap Darurat Bencana Hidrometeorologi di Kabupaten Bekasi tahun 2023.

Berdasarkan surat keputusan tersebut, perangkat daerah diminta mengerahkan seluruh sumber daya manusia, peralatan, dan logistik untuk membantu warga terdampak. Seluruh bantuan ini dikomandoi BPBD Kabupaten Bekasi.

Berdasarkan data Pusdalops Kabupaten Bekasi, akibat berbagai bencana yang terjadi selama lebih dari dua pekan terakhir, sedikitnya 463 rumah warga rusak, baik berat maupun ringan. Kerusakan rumah disebabkan oleh banjir, puting beliung, dan longsor yang terjadi di beberapa titik. Selain itu, sebanyak 120 gedung sekolah pun terdampak bencana. ● yan

## Diduga Korsleting, 30 Rumah Semipermanen di Setiabudi Terbakar

**JAKARTA (IM)** - Kebakaran melanda 30 unit bangunan semipermanen di Jalan Edi IX, Guntur, Setiabudi, Jakarta Selatan, Minggu (12/3) pagi.

Perwira Piket Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Keselamatan (Sudin Gulkarmat) Jakarta Selatan, Mochammad Arief mengatakan, pihaknya menerima informasi kebakaran tersebut pukul 05.50 WIB.

"Kami terima berita sekitar pukul 05.50 WIB, awal pemadaman pada pukul 06.00 WIB," ujarnya dalam keterangan tertulis.

Menurut dia, kebakaran diduga berasal dari korsleting salah satu bangunan di kawasan tersebut.

Api merambat dengan cepat sehingga menghancurkan bangunan lainnya.

"Diduga korslet-

ing listrik salah satu kontrakan yang bahan bangunan semipermanen. Api cepat merambat menghancurkan kurang lebih 30 hunian," katanya.

Arief menambahkan, sebanyak 22 unit mobil pemadam dikerahkan untuk memadamkan si jago merah.

Menurut dia, kurang lebih selama satu jam, sebanyak 105 personel turun langsung untuk memadamkan api.

"Selepas pemadaman pada pukul 07.45 WIB," terangnya.

Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Namun, sebanyak 30 kepala keluarga (KK) yang terdiri dari 100 jiwa kehilangan tempat tinggalnya.

"Luas area yang terbakar 400 meter persegi," paparnya.

Akibat kejadian ini, ditaksir kerugian sebesar Rp 150 juta. ● yan

# 4 | Metropolis

FOTO/ANT



## ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN DI JAKARTA

Foto udara areal persawahan di tengah permukiman padat penduduk di kawasan Rorotan, Jakarta Utara, Minggu (12/3). Kementerian Pertanian mencatat, alih fungsi lahan pertanian mencapai 90 ribu hingga 100 ribu hektare per tahun, konversi lahan tersebut menjadi salah satu ancaman bagi sektor pertanian dalam upaya meningkatkan produksi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

# Teknologi RDF Dinilai Tidak Tepat untuk Atasi Sampah di Jakarta

Untuk kota metropolitan dengan jumlah sampah yang sangat besar dan lahan terbatas, maka mengolah sampah untuk menghasilkan energi listrik, jelas lebih sesuai, kata Ketua Umum Kopetindo (Koperasi Energi Terbarukan Indonesia), Widi Pancono.

**JAKARTA (IM)** - Teknologi refuse derived fuel (RDF) dinilai tidak tepat untuk mengatasi sampah di Jakarta. Alasannya teknologi ini banyak kekurangan dan kelemahan untuk diaplikasikan sebagai metode pengolahan sampah. Hal ini dikatakan pemerhati masalah persampahan Widi Pancono.

"Jangan sampai sampah ini menjadi masalah tanpa usai dan terlalu lama kita hanya berputar pada debat-debat tak berujung tentang metode pengolahan sampah," kata Widi yang juga Ketua Umum

Kopetindo (Koperasi Energi Terbarukan Indonesia), Sabtu (11/3).

Dia mengatakan, sampah memang masih menjadi masalah besar di sejumlah kota besar di Indonesia, terutama kota-kota besar di Jawa. "Khusus untuk Jakarta yang setiap hari menghasilkan 8.000 sampai 8.500 ton sampah, harus menjadi perhatian serius. Perlu ada penanganan dan teknologi tepat untuk mengatasinya," kata Widi.

Menurutnya, setiap kota mempunyai karakteristik sendiri dalam menyelesaikan

masalah sampah. Jangan sekadar mengolah sampah tanpa memahami karakteristik tersebut dan jangan sampai sembarangan menerapkan cara pengolahan sampah.

"Untuk kota metropolitan dengan jumlah sampah yang sangat besar dan lahan terbatas, maka mengolah sampah untuk menghasilkan energi listrik, jelas lebih sesuai," kata Widi.

Dijelaskan Widi, RDF merupakan teknologi pengolahan sampah melalui proses homogenizers menjadi ukuran yang lebih kecil melalui pencacahan sampah atau dibentuk menjadi pelet. Hasilnya akan dimanfaatkan sebagai sumber energi terbarukan dalam proses pembakaran recovering batu bara untuk pembangkit tenaga listrik.

Namun teknologi RDF, kata Widi, tidak tepat diterapkan di Jakarta. Di Jakarta, teknologi insinerator yang paling tepat karena sampah

akan habis dibakar, baik sampah organik maupun anorganik.

"Yang pasti, sampahnya harus musnah. Ini yang terpenting. Dan juga harus mampu menghasilkan energi listrik terbarukan sehingga dapat menambah bauran energi listrik terbarukan di sistem pembangkitan PLN. Metode insinerator dapat melakukan itu dengan baik," katanya.

Sejumlah negara seperti Singapura, Jepang, Korsel,

dan beberapa negara di Eropa sudah menggunakan teknologi insinerator dan terbukti sangat efektif.

Dikatakan sudah saatnya pemerintah serius menangani masalah sampah apalagi sudah ada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2018 tentang Percepatan Pembangunan Instalasi Pengolah Sampah Menjadi Energi Listrik Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan. ● yan

## Warga Korban Kebakaran Depo Plumpang Minta Pertanggungjawaban Pertamina

**JAKARTA (IM)** - Warga korban kebakaran Depo Plumpang akan mengirim surat secara resmi kepada PT Pertamina untuk meminta pertanggungjawaban atas insiden tersebut. Ketua Forum Komunikasi Tanah Merah Bersatu (FKTMB), Mohamad Huda mengatakan masyarakat akan demo jika Pertamina tidak memberikan tanggapan.

"Senin kami akan menyuarai Pertamina secara resmi," kata Huda dalam diskusi yang diadakan di Lebak Bulus, Jakarta Selatan, pada Sabtu (11/3).

Warga Kampung Tanah Merah akan memberikan waktu kepada perusahaan pelat merah itu untuk memberikan tanggapan dalam kurun waktu 2x24 jam. Jika Pertamina tidak memberikan tanggapan dalam 2x24 jam, warga akan melakukan demonstrasi.

"Bagaimana nih sikap Pertamina, ada pernyataan resmi tertulis soal tanggung jawabnya masalah ganti materi, kerugian warga itu, dijawab 2x24 jam. Kalau nggak ada respons kita gerak," katanya.

Huda menjelaskan, ini merupakan hasil dari kesepakatan warga Kampung Tanah Merah yang menjadi korban

atas bencana kebakaran Depo Plumpang yang terjadi pada Jumat, 3 Maret 2023 lalu.

Selain itu, pihaknya juga mensinyalir bahwa ada tindak pidana dalam insiden tersebut. "Kita bicara jalur hukum pidana, karena kami mensinyalir kita bisa mempidanakan Pertamina atas kelalaian tersebut sehingga merugikan para korban," ujarnya.

## Tuntutan Warga Kampung Tanah Merah

Sebelumnya, dalam rilis FKTMB yang diterima, warga korban kebakaran Depo Pertamina Plumpang memberikan sejumlah tuntutan kepada Pertamina.

- Berikut daftarnya:
  1. Meminta pertanggungjawaban Pertamina terhadap para korban baik secara materi maupun non materiil.
  2. Memberikan kompensasi terhadap keluarga korban yang meninggal.
  3. Merehabilitasi dan renovasi rumah warga yang hancur akibat kebakaran.
  4. Menginvestigasi dan melakukan audit kepada Pertamina atas kebakaran yang terjadi karena ini murni kesalahan teknis yang dilakukan oleh internal Pertamina.
  5. Merelokasi Depo Plumpang ke wilayah yang jauh dari permukiman warga karena sudah tidak layak depo Plumpang berada di tengah kota dan pemukiman.

Tuntutan warga ini juga disampaikan melalui spanduk yang terpasang di RW 09 Kelurahan Kampung Rawa Badak Selatan, Jakarta Utara.

Berdasarkan pantauan, spanduk tersebut terpasang di dua lokasi. Yakni di Jalan Tanah Merah Bawah, Kelurahan Rawa Badak Selatan dan satunya lagi di sebuah rumah yang hangus terbakar.

Selain berisi tuntutan kepada Pertamina, ada juga spanduk berisi permintaan warga agar bencana kebakaran Depo Pertamina Plumpang tidak dipolitisasi. "Jangan Politisasi Musibah Warga Indonesia," demikian tulisan yang tercantum dalam spanduk tersebut. ● yan

FOTO: IM/KRIS



## OGOHO-OGOHO MENYAMBUT HARI SUCI NYEPI

Umat Hindu mengarak Ogoh-ogoh di Hari Bebas Kendaraan Bermotor atau Car Free Day di kawasan Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta, Minggu (12/3). Kegiatan tersebut dalam rangka menyambut Hari Suci Nyepi Tahun Saka 1945 (2023), sekaligus merayakan ulah tahun Lembaga Kesenian Bali Saraswati ke-55.

### PENGUMUMAN

Dengan ini diumumkan kepada masyarakat luas, sesuai dengan ketentuan Pasal 127 Ayat (2) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, rencana pengambilalihan seluruh saham milik PT Utama Karya (Persero) dan Yayasan Kesejahteraan Karyawan PT Utama Karya (Persero) dalam PT Medan Binjai Toll ("Perseroan"), suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan dan tunduk pada hukum negara Republik Indonesia, yang berdomisili di Kantor Gerbang Tol Binjai Jl. Megawati, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, yang akan mengakibatkan berubahnya pengendalian terhadap Perseroan ("Pengambilalihan").

Bagi pihak-pihak yang berkepentingan yang membutuhkan informasi lebih lanjut atau ingin menyampaikan keberatan terhadap Pengambilalihan, dapat menghubungi Direksi Perseroan dalam waktu paling lambat empat belas (14) hari sejak tanggal pengumuman ini ke:

**PT Medan Binjai Toll**  
Kantor Gerbang Tol Binjai Jl. Megawati, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, Indonesia  
**Attn: Direksi**  
Jakarta, 13 Maret 2023

**PT Medan Binjai Toll**  
PT Utama Karya (Persero)  
Yayasan Kesejahteraan Karyawan PT Utama Karya (Persero)

### PENGUMUMAN

Dengan ini diumumkan kepada masyarakat luas, sesuai dengan ketentuan Pasal 127 Ayat (2) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, rencana pengambilalihan seluruh saham milik PT Utama Karya (Persero) dan Yayasan Kesejahteraan Karyawan PT Utama Karya (Persero) dalam PT Bakauheni Terbanggi Besar Toll ("Perseroan"), suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan dan tunduk pada hukum negara Republik Indonesia, yang berdomisili di Kantor Gerbang Tol Itera Kota Baru Jl. Terusan Ryacudu, Kabupaten Lampung Selatan, Lampung, yang akan mengakibatkan berubahnya pengendalian terhadap Perseroan ("Pengambilalihan").

Bagi pihak-pihak yang berkepentingan yang membutuhkan informasi lebih lanjut atau ingin menyampaikan keberatan terhadap Pengambilalihan, dapat menghubungi Direksi Perseroan dalam waktu paling lambat empat belas (14) hari sejak tanggal pengumuman ini ke:

**PT Bakauheni Terbanggi Besar Toll**  
Kantor Gerbang Tol Itera Kota Baru Jl. Terusan Ryacudu, Kabupaten Lampung Selatan, Lampung, Indonesia  
**Attn: Direksi**  
Jakarta, 13 Maret 2023

**PT Bakauheni Terbanggi Besar Toll**  
PT Utama Karya (Persero)  
Yayasan Kesejahteraan Karyawan PT Utama Karya (Persero)

### INFORMASI PENUTUPAN KANTOR CABANG KB BUKOPIN

Yth Nasabah KB Bukopin,

Dengan ini kami informasikan bahwa efektif pada tanggal 14 April 2023 akan dilakukan penutupan layanan Kantor Cabang Operasional sebagai berikut:

#### Kantor Cabang Pembantu Harapan Indah

Jalan Sentra Niaga Boulevard Hijau SN 1 No.9  
Bekasi - 17151

Terkait dengan penutupan layanan tersebut, Nasabah KB Bukopin tetap dapat melakukan transaksi di seluruh jaringan cabang dan e-channel Bank KB Bukopin.

Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi:  
Halo KB Bukopin 14005 dan Bank KB Bukopin  
Kantor Kelapa Gading (021) 45851405

Hormat Kami,  
PT Bank KB Bukopin, Tbk

**KB Bukopin**